

Implementasi Inovasi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2020 (Studi Pada Layanan Informasi Status Kepesertaan Bansos)

Verto Septiandika¹, Mega Dwi Septiana²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Panca Marga Probolinggo

Email korespondensi: megadwisep02@gmail.com

Abstract: *The current pandemic has had an impact on a number of sectors ranging from politics, economy, law, social, culture, defense and security. The Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia resulted in the community being affected by high layoffs. The industry is also at a critical point due to a drastic decline in supply and demand. In the regulatory sector, the government is experimenting with various policies ranging from large-scale social restrictions, the provision of social assistance, to the Emergency PPKM which has been in effect since July 2021. Each policy is aimed at the public interest. Social assistance in the form of material and non-material (groceries & medicines) is a government policy tool to suppress the impact of Covid-19. This paper argues that there are policy innovations in government regulations in the Probolinggo Regent Regulation Number 41 of 2021. Using the library research method and qualitative data analysis according to Miles and Hiberman, namely through, this paper argues that these regulations are the basis for the policy of providing assistance social life during a pandemic. This research concludes that the above rules regulate the provision of social assistance for the people of Probolinggo Regency. However, there are still data on social assistance recipients that are not appropriate. As a result, there are residents who do not receive assistance or are not even targeted. This is because not all residents are properly registered and not all residents meet technical requirements such as valid identity cards and family cards.*

Keywords : *Pandemic, Sosial Assistance, Covid-19, Regent's Regulation*

Abstrak: Pandemi yang terjadi saat ini telah berdampak pada sejumlah sektor mulai dari politik, ekonomi, hukum, social, budaya, pertahanan dan keamanan. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan masyarakat terdampak dengan pemutusan hubungan kerja yang tinggi. Perindustrian pun berada pada titik kritis akibat penurunan permintaan dan penawaran secara drastis. Di sektor regulasi, pemerintah bereksperimen dengan beragam kebijakan mulai dari pembatasan sosial berskala besar, pemberian bantuan sosial, hingga PPKM Darurat yang berlaku sejak Juli 2021. Setiap kebijakan ditujukan untuk kepentingan umum. Bantuan sosial baik berupa materi maupun non-materi (sembako & obat-obatan) adalah perangkat kebijakan pemerintah untuk menekan dampak Covid-19. Tulisan ini berargumentasi bahwa terdapat inovasi kebijakan dalam peraturan pemerintah lewat Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2021. Menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) serta analisis data kualitatif menurut Miles dan Hiberman, tulisan ini berargumentasi bahwa aturan tersebut menjadi dasar kebijakan pemberian bantuan sosial di masa pandemi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa aturan di atas mengatur ketentuan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Meskipun demikian, sejumlah persoalan masih ditemukan yakni ketidaksesuaian dana penerima bansos. Akibatnya terdapat warga yang tidak mendapat bantuan atau bahkan tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan tidak semua warga terdata dengan baik dan tidak semua warga memenuhi syarat teknis seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang valid.

Kata Kunci: Pandemi, Bantuan Sosial, Covid-19. Peraturan Bupati

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Maret 2020, menjadi bulan dimana ditemukannya kasus Covid-19 pertama. Seluruh aspek terdampak, aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan lainnya. Salah satu sektor yang terdampak yakni sektor ekonomi. Data tersebut dapat dilihat melalui laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu (Bestari Kumala Dewi, 2021).

Pandemi Covid-19 juga membuat pemerintah untuk melakukan berbagai inovasi agar kehidupan tetap berjalan. Inovasi yang dilakukan ialah di ranah kebijakan public yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurut teori inovasi yaitu *model product and process* (Knight 1967) inovasi diperlukan secara bertahap untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menghasilkan pelayanan baru yang berkualitas (Wahyudi, 2019). Dalam kondisi pandemi, inovasi kebijakan publik berupa mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya yakni melalui Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggara Kegiatan Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus 2019 (Covid-19) di Kabupaten Probolinggo.

Banyak masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19 tersebut, sehingga pemerintah pusat melakukan beberapa terobosan untuk membantu masyarakat yang terdampak, seperti bantuan pelatihan pra-kerja, bantuan sosial, bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan lain sebagainya. Penyaluran dana bantuan sosial berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai Peraturan Pemerintah 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengalami perubahan beberapa kali hingga menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 tahun 2021. Dana tersebut dikelola dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab.

Bantuan sosial sendiri merupakan program yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Bantuan sosial tersebut nantinya diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak, seperti terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), usahanya bangkrut, dan lain-lain. Bantuan tersebut berupa uang tunai dan sembako. Misalnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan senilai 300.000 perbulan, yang akan dibagi menjadi 2 yaitu uang tunai dan sembako. Uang tunai senilai 200.000 dan bantuan pangan non tunai senilai 100.000 jadi totalnya yaitu 300.000. Presiden Jokowi, berharap masyarakat yang terdampak dapat terbantu dengan adanya bansos tersebut, dan pemulihan ekonomi selama pandemi dapat segera dilakukan

Bantuan sosial juga akan dibagikan ke seluruh Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan utama, yaitu proses pembagian bansos. Masih banyaknya masyarakat yang belum menerima bansos. Tidak hanya itu, permasalahan yang terjadi yaitu masih terdapat tidak sinkronnya data yang dimiliki dinkes dan RT/RW penerima bansos. Masyarakat yang tidak layak menerima, justru menjadi penerima bansos, dan sebaliknya masyarakat yang terdampak pandemi tidak menerima bansos. Ini menimbulkan polemik di masyarakat, yang menuntut agar transparan dan kejelasan dalam pembagian bansos tersebut.

Tidak hanya di Kabupaten Probolinggo sejumlah tempat juga mengalami masalah yang sama terkait penyaluran bantuan sosial tunai, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Maros. Masih terdapat data penerima dan penyaluran bansos. Adanya permasalahan terkait bansos hingga terjadi protes dan penolakan masyarakat akibat penyaluran bansos yang bermasalah selama pandemi. Di beberapa daerah di Jawa Barat, berbagai pihak, mulai dari warga hingga perangkat desa, menolak bansos karena merasa bahwa data yang ada tidak akurat sehingga penyaluran bansos tidak menyeluruh atau tidak tepat sasaran. Di Kabupaten Maros, warga protes karena merasa ada pihak yang membutuhkan, tetapi tidak mendapatkan bantuan. Dengan adanya permasalahan tersebut Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, menekankan pentingnya sinkronisasi penyaluran bansos agar tidak muncul kesalahpahaman masyarakat akibat perbedaan waktu dan cara penyaluran bansos (Bryson, 2004).

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam melaksanakan pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak akibat Covid 19, dan dana tersebut berasal dari APBD maka peneliti menjelaskan bagaimana bupati mengimplementasikan proses menyalurkan bansos pada masyarakat menggunakan peraturan sosial distancing yang ditetapkan oleh badan kesehatan, untuk mendisiplinkan masyarakat dan mencegah penularan Covid 19 dalam proses penerapan bansos di Kabupaten Probolinggo. Serta bagaimana hasil mengenai pemberian dana bansos kepada masyarakat khususnya Kabupaten Probolinggo dan kendala yang dialami pemerintah dalam penyaluran bansos. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dalam permasalahan yang berkaitan penyaluran dan bansos pemerintah, penulis akan melakukan penelitian dengan judul implementasi inovasi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2020 (studi layanan informasi status kepesertaan bansos).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penela'ah terhadap buku, literatur, catatan, jurnal, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988). Metode ini digunakan untuk memberikan data yang mendukung inovasi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 tahun 2020 untuk mengatur kepesertaan bansos. Menurut Kuhlthau, berbagai tahapan kajian pustaka ke dalam enam tahapan proses: (1) pemilihan topik, (2) eksplorasi informasi, (3) menentukan fokus penelitian, (4) pengumpulan sumber data, (5) persiapan penyajian data, dan (6) penyusunan laporan Sumber Data. Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih (Kuhlthau, 2004).

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini melalui dokumentasi, yaitu mencari data yang sesuai mengenai hal-hal atau informasi berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, berita dan lain sebagainya (Arikunto, 2010). Menurut Zed (2004) ada empat ciri utama studi pustaka, bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya, data pustaka bersifat siap pakai, disini peneliti tidak pergi kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia dipergustakaan, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber skunder, ini bermakna bahwa peneliti, memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama dilapangan, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Perbup Nomor 41 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggara Kegiatan Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Probolinggo

Kebijakan utama dalam mewujudkan penataan kehidupan baru sehingga menciptakan masyarakat sehat dan sejahtera akibat dampak dari corona virus disease dimasa pandemi. Pemerintah menyalurkan bantuan sosial pada tahun 2020 bantuan sosial tersebut disalurkan kepada masyarakat atau warga yang terdampak seperti kena pemberhentian kerja(PHK), usahanya bangkrut dan lain-lainnya. Tiga bansos yang disalurkan pemerintah ialah bansos beras, program keluarga harapan, program dorongan tunai berbentuk sembako (Hasibuan et al., 2021).

Adapun tujuan dari diadakannya program bantuan sosial tersebut dari tahap pertama hingga ketiga ialah untuk memperkuat bidang Jaring Pengaman Sosial. Bantuan sosial tahap pertama yang telah dilaksanakan sebelumnya berupa uang tunai memiliki tujuan utama untuk menopang kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Kemudian dilanjutkan dengan bantuan sosial tahap kedua yang memiliki tujuan tambahan untuk mendukung serta memastikan pemulihan kesehatan dan gizi masyarakat. Pada tahap tersebut, bantuan sosial yang disalurkan berupa sembako (bahan pangan).

Hal ini bertujuan agar bantuan sosial tersebut nantinya dapat berdampak positif dalam bidang Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan Ekonomi. Ini sangat membantu dalam memfasilitasi agar penerima bantuan sosial dapat menerima bantuan sosial tahap ketiga tersebut secara langsung. Hal ini juga untuk mengantisipasi agar tidak adanya penyalahgunaan bantuan sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat Kabupaten probolinggo yang terdampak Covid-19. Program bantuan yang disalurkan diantaranya:

- a) Program keluarga harapan ialah bansos yang diberikan pemerintah kepada keluarga bersyarat, ialah keluarga miskin dengan seluruh komponen buat menolong mensejahterakan kehidupan ekonomi keluarga penerima. Besar pemberian pada anak umur 0- 6 tahun beserta bunda berbadan dua menerima Rp 250. 000 tiap bulan, seseorang anak sekolah dasar Rp 75. 000 tiap bulan, seseorang anak jenjang pembelajaran SMP Rp 125. 000 etiap bulan, seseorang anak sekolah menengah akhir Rp 166. 000 tiap bulan, penerima lanjut usia sebesar Rp 200. 000 tiap bulan. Pemerintah pula membagikan dorongan sarana pelayanan kesehatan serta pembelajaran layak. Demi terwujudnya pemberian dorongan tersebut tersalurkan pada masing- masing kecamatan ada SDM buat pengawal proses pencairan dana dorongan tersebut supaya pas target.
- b) Program dorongan tunai berbentuk sembako ialah bansos yang diberikan senilai Rp 300. 000 tersyarat serta ditargetkan pada 9 juta keluarga penerima. Dikeluarkan lewat PT Pos Indonesia serta bank miik negeri. Penerima tersyarat yang telah masuk informasi terpadu kesejahteraan sosial ataupun yang tidak terdata di informasi terpatu kesejahteraan sosial. Dengan anggaran 12 triliun disalurkan desember 2020 serta diperpanjang sampai 2021. Buat mengenali serta pengecekan informasi penerima melalui cekbansos. siks. kemsoso. go. id.Bansos diperpanjang dengan anggaran 45, 12 triliun berlaku buat program bansos sembako serta tunai penerima 18, 8 juta keluarga.
- c) Bantuan sosial berupa beras sebanyak 15 kg perbulan disalurkan kepada warga terdampak Covid pada waktu pandemi, disalurkan agustus sampai oktober 2020. Penerima bansos beras 10 juta keluarga penerima PKH di 34 provinsi. Disalurkan lewat bulog kepada tiap kelurahan didata beserta mutu berasnya supaya tidak terjalin kesalahgunaan. Penyaluran melalui bulog mutu beras terjamin.

Syarat masyarakat penerima bansos tersebut menjadi hal yang penting bagi pemerintah agar penyaluran dana bantuan tersebut tepat sasaran. Menurut menteri sosial Idris Marham menyebutkan ada tiga cara supaya bansos dapat tepat sasaran dan tepat waktu: hal yang pertama yaitu sigap dan tanggap, seorang pimpinan yang memiliki peran penting dalam proses penyaluran dana tersebut harus bersikap siap dan tanggap. Pejabat pimpinan harus selalu siap dalam hal fisik dan memilii niat yang tulus agar prosedur yang dilakukan berjalan dengan lancar. Menurut idris kunci keberlngsungan berjalan dengan lancar adalah niat apabila sudah niat segala sesuatu atau hal lain akan mengikuti. Hal terpenting selanjutnya bekerjasama,memiliki tali silaturahmi yang erat antara pemerintah daerah,bulog dengan memiliki kejujuran demi kesuksesan penyaluran bansos (hartomo, 2018).

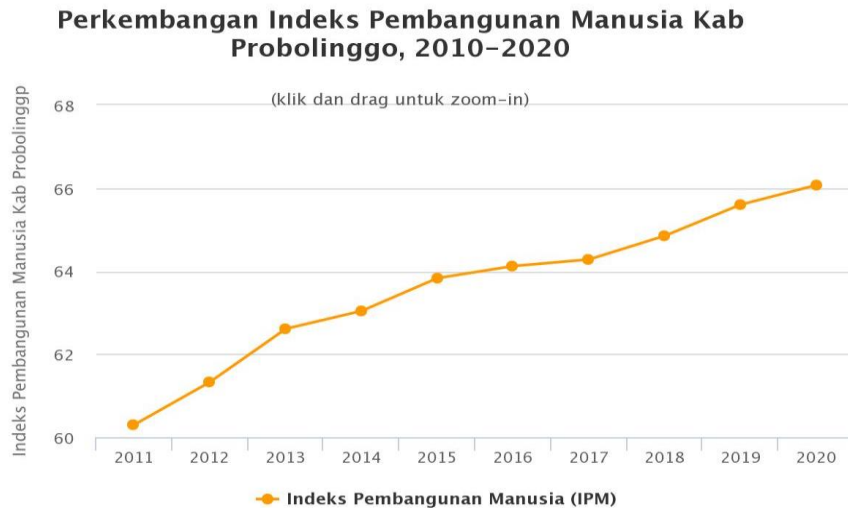
Pelaksanaan pemberian program bantuan sosial di Kabupaten Probolinggo merupakan program penanggulangan kemiskinan akibat bencana nasional non alam pandemi Covid-19 yang menjadi sasaran perorangan dengan ekonomi menengah kebawah yang berada dalam lingkup administrasi dikabupaten tersebut,berdasarkan data penduduk masyarakat di Kabupaten Probolinggo didesa setiap kecamatan tahun 2017 berjumlah 1.158 653 orang, sehingga penyebaran belum sepenuhnya merata dan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan sehingga harus dapat diatasi melalui program bantuan soaial pemerintah kabupaten probolinggo (Dadu & Sodik, 2021).

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Probolinggo, 2017

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Sukapura	9 967	10 245	20 212	0,97
2 Sumber	13 445	13 987	27 432	0,96
3 Kuripan	14 693	15 741	30 434	0,93
4 Bantaran	20 262	22 223	42 485	0,91
5 Leces	28 363	29 875	58 238	0,95
6 Tegalsiwalan	18 351	19 992	38 343	0,92
7 Banyuwanyar	26 399	28 439	54 838	0,93
8 Tiris	32 808	33 929	66 737	0,97
9 Krucil	27 929	27 961	55 890	1,00
10 Gading	24 465	26 287	50 752	0,93
11 Pakuniran	21 581	22 515	44 096	0,96
12 Kotaanyar	17 893	18 848	36 741	0,95
13 Paiton	36 529	37 170	73 699	0,98
14 Besuk	23 130	24 881	48 011	0,93
15 Kraksaan	34 658	35 921	70 579	0,96
16 Krejengan	19 465	20 707	40 172	0,94
17 Pajarakan	17 255	18 478	35 733	0,93
18 Maron	31 528	33 529	65 057	0,94
19 Gending	20 216	21 078	41 294	0,96
20 Dringu	26 775	27 015	53 790	0,99
21 Wonomerto	19 844	20 924	40 768	0,95
22 Lumbang	15 888	16 738	32 626	0,95
23 Tongas	32 770	34 554	67 324	0,95
24 Sumberasih	31 194	32 208	63 402	0,97
Probolinggo	565 408	593 245	1 158 653	0,95

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa total populasi masyarakat Kabupaten Probolinggo jika dilihat berdasarkan jenis kelamin di tahun 2017. Populasi masyarakat berjenis kelamin laki-laki terdapat 565.408, lalu untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 593.245 dan total jumlah populasi keduanya berjumlah 1.158.653 dengan persentase rasio total masyarakatnya berjumlah 0,95. Data tersebut diambil melalui Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.



Gambar 1. Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Probolinggo, 2010-2020

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo

Dilihat dari perkembangan di atas menurut peneliti perkembangan populasi manusia semakin tahun semakin bertambah. Apalagi pada masa pandemi ini karna adanya pembatasan sosial sehingga mengakibatkan banyaknya penduduk baru angka kelahiran meningkat. Perhitungan indeks pembangunan manusia ini merupakan sebuah tolak ukur dan perbandingan sesuai standart hidup sebuah negara dan menjau tolak ukur dalam pengaruh ekonomi kualitas hidup masyarakat. Indeks pembangunan manusia ini terdapat tiga dimensi yang digunakan sebagai perhitungan ketepatan yaitu:

a) Umur panjang dan hidup sehat

Berdasarkan gambar di atas pengukuran angka kehidupan masyarakat yang sehat dari tahun ketahun semakin meningkat begitu pla angka kelahiran sehingga populasi masyarakat meningkat.

b) Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksud ini yaitu pendidikan. Pendidikan yang diberikan pemerintah pusat/daerah apa sudah maksimal diberikan kepada warganya. Disini kita melihat melalui indeks tersebut bahwa Kabupetan Probolinggo telah mengalami peningkatan, khususnya jika melihat melalui dimensi pengetahuan.

c) Dimensi ini dapat dilihat melalui warganya yang telah mengikuti wajib belajar 12 tahun, lalu bagaimana tingkat kelulusan warganya, rata-rata masyarakatnya lulusan apa, dan lain sebagainya sehingga terciptanya masyarakat yang terdidik dan berpengetahuan diharapkan dapat mendorong daerahnya menjadi daerah yang maju dan berkembang.

d) Standar hidup yang layak

Standar hidup yang layak ini, banyak dipengaruhi seperti batasan UMK yang telah ditetapkan berapa, lalu bagaimana layak hidup masyarakatnya, sandang pangan nya bagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat. Di kabupaten Probolinggo sendiri, terdapat PLTU Paiton sehingga menjadikan daerahnya menjadi penghasil tenaga listrik terbesar di sekitarnya. Lalu standar hidup layak yang lain apa? Bisa dilihat dengan masyarakatnya yang mulai mengubah profesi yang dulunya tradisional menjadi modern. Pertanian yang mulai berkembang dengan mengadopsi teknologi dalam pelaksanaanya.

Inovasi Pengaduan Bansos Masyarakat di Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan pernyataan di atas terkait dampak dan permasalahan akibat pandemi Covid-19 dimasa pandemi, Pemerintah Kabupaten bersama jajaran OPD(organisasi pemerintah daerah) Kabupaten Probolinggo mengeluarkan inovasi baru untuk memudahkan masyarakat dalam menerima informasi terkait pengaduan dan penerimaan bansos. Adanya inovasi tersebut dapat memudahkan

pemkab dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat agar tepat sasaran, inovasi yang dibuat pemerintah kabupaten tersebut merupakan sebuah aplikasi digital yang terdapat di android sehingga kapan saja dan dimana saja masyarakat bisa menerima informasi hanya dengan fasilitas genggam. Karna banyaknya laporan terkait penyaluran bansos seperti terdapatnya sebuah penyelewengan bagi pemberi bansos sehingga masyarakat yang seharusnya menerima malah tertunda. Sehingga untuk meminimalisir masalah tersebut maka pemerintah memberikan layanan informasi seluasnya kepada masyarakat penerima bansos, melalui aplikasi tersebut masyarakat bisa mengecek data dan jenis bantuan yang diterima atau tidak (Dur, 2020). Bahwa menggunakan aplikasi tersebut maka masalah dalam bansos ditemukan dari pengaduan warga. Secara ringkas, masalah dalam bansos yakni yakni ketidaksesuaian dana penerima bansos. Akibatnya terdapat warga yang tidak mendapat bantuan atau bahkan tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan tidak semua warga terdata dengan baik dan tidak semua warga memenuhi syarat teknis seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang valid.

Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo, Ahmad Arif mengatakan pemerintah telah mengeluarkan aplikasi yang berisi tentang segala informasi mengenai bansos yang dapat di akses dengan mudah dan informasi yang akurat. untuk mengakses aplikasi tersebut cukup kunjungi laman <https://siagacovid19.probolinggokab.go.id> kemudian masukkan nomor induk kependudukan, lalu isi aduan permasalahan mengenai bansos dan isi nomor telepon pengadu (*Sediakan Layanan Informasi Status Kepesertaan Bansos dan Pengaduan Masyarakat – Portal Kabupaten Probolinggo*, 2020).

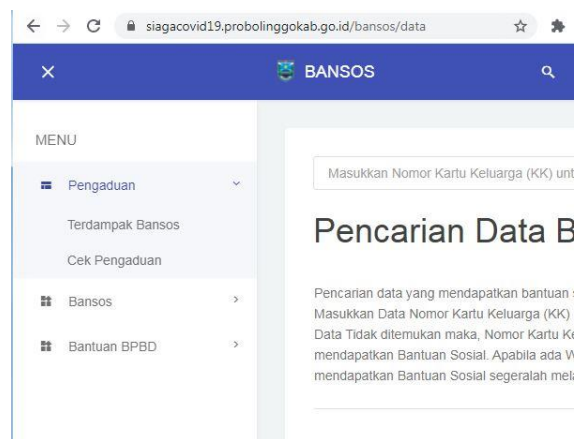
Menurut Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo Yulius Christian mengatakan adanya aplikasi pengaduan tersebut meminimalisir terjadinya masyarakat gaduh dan saling menyalahkan apabila tidak sesuai. Setelah adanya aplikasi pengaduan tersebut data pengaduan yang masuk lebih dari 200, menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo Ahmad Arif mengatakan masyarakat memang butuh informasi terkait penyaluran bansos, baik bansos pemerintah pusat dan provinsi maupun kabupaten, dengan banyaknya jenis aduan yang muncul beragam mulai dari pertanyaan mengenai pencaian bantuan sosial atau pelaksanaan penyaluran. Ada juga aduan warga untuk menyampaikan belum menerima bansos. Memang bantuan sosial tersebut setiap warga tidak diperbolehkan menerima double menurut kepala dinas sosial kabupaten probolinggo bansos diberikan kepada warga yang tidak pernah menerima bansos lain seperti PKH bpnt, dan juga bantuan sosial tunai dana dari ada lainnya (Radar Bromo, 2020)

Mengenai permasalahan diatas, berikut website Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk masyarakatnya agar dapat mengakses informasi mengenai bansos di kabupaten probolinggo.



Gambar 2. Tampilan Awal Website Pengaduan Bansos Milik PemKab Probolinggo

Sumber: <https://siagacovid19.probolinggokab.go.id/bansos/data>



Gambar 3. Tampilan di Bagian Menu Pengaduan

Sumber: <https://siagacovid19.probolinggokab.go.id/bansos/data>

Berdasarkan data yang dimiliki NusaDaily.com, ada total 16.074 orang penerima BST se-Kabupaten Probolinggo, mereka tersebar di 24 kecamatan yang rinciannya sebagai berikut :

- Kecamatan Bantaran 317 penerima
- Kecamatan Banyuwang 699 penerima
- Kecamatan Besuk 519 penerima
- Kecamatan Dringu 1243 penerima
- Kecamatan Gading 727 penerima
- Kecamatan Gending 642 penerima
- Kecamatan Kotaanyar 641 penerima
- Kecamatan Kraksaan 1650 penerima
- Kecamatan Krejengan 830 penerima
- Kecamatan Krucil 265 penerima
- Kecamatan Kuripan 347 penerima
- Kecamatan Leces 1135 penerima
- Kecamatan Lumbang 301 penerima
- Kecamatan Maron 937 penerima
- Kecamatan Paiton 825 penerima
- Kecamatan Pajarakan 705 penerima
- Kecamatan Pakuniran 311 penerima
- Kecamatan Sukapura 186 penerima
- Kecamatan Sumber 137 penerima
- Kecamatan Sumberasih 833 penerima
- Kecamatan Tegalsiwalan 533 penerima
- Kecamatan Tiris 1064 penerima
- Kecamatan Tongas 653 penerima
- Kecamatan Wonomerto 554 penerima

Penerima manfaat BST Rp 600 ribu/ bulan dikhususkan kepada masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam DTKS, namun yang tidak pernah menerima BLT, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui informasi dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo



Gambar 4. Layanan Informasi Terkait Status Kepesertaan Bansos Serta Pengaduan Masyarakat

Sumber: <https://siagacovid19.probolinggokab.go.id/bansos/data>

Kendala dalam pelaksanaan implementasi Bupati Probolinggo dalam Penyaluran Bansos

Pada hakikatnya dalam implementasi penyaluran bansos yang dilakukan oleh bupati probolinggo tersebut telah dilakukan melalui kantor PT.POS yang ada disekitar Kabupaten Probolinggo. Masyarakat yang terdaftar nantinya akan di infokan oleh petugas RT/RW setempat untuk nantinya masyarakat dapat mengambil bantuan sosial tersebut di kantor pos masing-masing dengan membawa data pribadi dan surat penerima bansos yang telah di data sebelumnya oleh petugas RT/RW setempat. Lalu dalam penyerahan bansos tersebut, harus tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah di tentukan. Seperti memakai masker, menjaga jarak dan Prokes lainnya yang terdiri dari 5M. Sebanyak 16. 074 masyarakat kabupaten probolinggo menerima bantuan sosial tunai selaku kompensasi pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid- 19. Bantuan sosial tunai disalurkan lewat PT Pos indonesia serta warga yang terdata berhak menerima bantuan serta bisa mengambil di masing- masing wilayah (akbar prambadi, 2020).

Lalu yang menjadi perhatian, adalah implementasi inovasi yang dilakukan oleh pemkab probolinggo dalam mendata atau membuat posko pengaduan pendataan masyarakat yang terdata untuk menerima bantuan sosial. Inovasi pelayanan yang diberikan yaitu dengan membuat sebuah aplikasi berbasis website yang nantinya jika ada masyarakat yang mengeluhkan atau ingin melakukan pengaduan terkait kepesertaannya didalam penerimaan bansos bisa melalui website tersebut

Tujuan Bupati Kabupaten Probolinggo dalam Menyalurkan Bansos Kepada Masyarakat Kabupaten Probolinggo

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) dengan jumlah penerima sebanyak 293 KK dari masyarakat kurang mampu selama 3 (tiga) bulan. Mulai bulan April hingga Juni 2020 akibat dampak wabah Covid-19. Masing-masing penerima memperoleh uang tunai sebesar Rp 600 ribu untuk bulan April. Bantuan ini akan diserahkan setiap bulan sampai bulan Juni mendatang. Penerima BLT – DD terpilih sesuai kriteria yang ditentukan, Kepala Keluarga (KK) yang tidak masuk data penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat diantaranya, bukan peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan lainnya. Bantuan ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Probolinggo (“BST Disalurkan, Pemkab Probolinggo Juga Sediakan Layanan Aduan Covid -19,2020).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) fokus kepada masyarakat kurang mampu di tengah tengah wabah Covid-19 sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan menteri Nomor 6 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang diinstruksikan pemerintah Pusat. Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menjelaskan ikhtiar akan terus dilakukan dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo berupaya untuk membantu mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat melalui BLT dari Dana Desa (DD) di tengah-tengah wabah Covid-19. “Bagi yang terdampak lebih parah itu harus diutamakan bantuannya. Tentu bantuan itu tidaklah mungkin mengakses pada seluruh masyarakat. Sehingga, data yang valid harus ada. Dengan transparansi data ini, harapannya masyarakat paham dan tidak menimbulkan persepsi atau permasalahan,” pungkasnya (*Bupati Tantri Serahkan BLT DD Bagi Masyarakat Terdampak Wabah COVID-19 – Portal Kabupaten Probolinggo*, 2020).

Secara mendasar kebijakan bantuan tunai sosial ini dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat akibat pandemi wabah virus corona (Covid-19). Penerima Bantuan Sosial Tunai ini didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS yang bersumber dari data ajuan Kabupaten Probolinggo.

Pemerintah membentuk program bantuan selama Covid -19 mempunyai tujuan yang ingin diraih seperti yang telah ditentukan. Untuk melihat indikator tercapainya tujuan dari program bansos tersebut dalam membantu masyarakat rentan yang terdampak Covid -19 dapat diukur melalui efektivitas pelaksanaan program bansos tersebut. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan yang sudah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Tindakan yang dilakukan harus tepat karena tujuan tidak akan tercapai atau dengan kata lain bantuan tidak efektif jika tindakan tersebut tidak tepat.

Efektivitas bisa dikatakan sebagai sebuah ukuran yang dapat menggambarkan sejauh mana target dapat tercapai. Keefektifan suatu program dapat diamati dari indikator-indikator berupa ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat selama pandemi Covid -19.

Dalam pelaksanaan suatu program terutama bantuan sosial yang langsung ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tidak bisa dipungkiri pasti terdapat kekurangan. Apalagi, ketika dalam masa pandemic Covid -19 yang mana tentunya semua masyarakat tanpa terkecuali merasa terdampak dan ketika terdapat suatu masyarakat yang tidak mendapatkan bansos bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, agar program bantuan sosial ini bisa lebih baik kedepannya, diperlukanlah pengukuran efektivitas program tersebut.

Tingkat keefektifitasan sebuah program dapat diukur dari beberapa sudut pandang tergantung bagaimana cara menilai dan mengimpresifikannya. Apabila suatu pekerjaan dan hasil usaha tidak mencapai sasaran yang diharapkan, bisa dikatakan bahwa hal tersebut belum efektif, begitupun sebaliknya. Untuk mengukur keefektifan sebuah program dibutuhkan tiga indikator, diantaranya:

- a) pencapaian tujuan, yaitu segala bentuk upaya untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Ada dua faktor, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target nyata.
- b) integrasi, yaitu mengukur tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsekuensi, Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c) adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian antara program dengan keadaan di lapangan.

Berdasarkan indikator yang sudah dipaparkan diatas, bisa diamati bahwa efektivitas pelaksanaan program bansos di Kabupaten Probolinggo memiliki kekurangan serta kelebihan dalam

penyaluran bantuan social tersebut. Pada dasarnya permasalahan yang menjadi kekurangan program bantuan sosial di Kabupaten Probolinggo adalah data yang tidak akurat dan tidak tepat sasaran karena tidak ada pembaharuan data. Data yang tidak tepat sasaran bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan bantuan sosial yang diberikan menjadi kurang efektif. Salah satu contohnya adalah, terjadinya kecemburuan sosial antara masyarakat yang mendapat bantuan social dengan yang tidak mendapat bantuan sosial. Bahkan dikarenakan tidak adanya pembaruan data masyarakat, bisa terjadi penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan social, sehingga berdampak dalam penyalagunaan dana bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan kelebihan dari penyaluran bantuan sosial tersebut selain menjaga daya beli masyarakat akibat pandemi wabah virus corona (Covid -19), juga memberikan dorongan semangat secara psikologis untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam masa pandemi wabah virus corona (Covid -19).

KESIMPULAN

Pandemi Covid -19 telah menyebabkan banyak peristiwa yang terjadi, roda perekonomian yang terhenti, aktifitas masyarakat yang harus dihentikan, kerumunan tidak boleh terjadi sehingga terjadi banyak sekali problem yang terjadi. Salah satunya yaitu di sektor ekonomi, banyak masyarakat yang terkena PHK dan terjadi kebangkrutan maupun kerugian di usaha yang dimiliki. Menyebabkan banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan berupa bantuan tunai maupun bantuan pangan. Di Kabupaten Probolinggo sendiri telah menyiapkan program bantuan sosial (bansos) untuk warganya. Sebanyak 16.074 masyarakat Kabupaten Probolinggo telah terdata sebagai penerima bansos. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa masalah, masalah yang menjadi perhatian yaitu masih terdapat masyarakat yang tidak terdata sebagai penerima bansos. Hingga terjadi protes warga yang dilakukan di salah satu desa yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Sehingga Pemkab Probolinggo membuat sebuah inovasi dengan mengacu kepada Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Masa Pandemi. Maka oleh karena itu perlu di implementasi inovasi yang harus dilakukan.

Berdasarkan pengertian, implementasi merupakan gagasan untuk mencapai suatu tujuan dengan suatu proses, strategi inovasi untuk memunculkan hal-hal baru dalam suatu kebijakan. Yang bertujuan untuk mengembangkan program-program yang sudah ada agar lebih efektif. Inovasi sendiri merupakan pengenalan untuk menghasilkan sebuah ide, produk, dan proses suatu prosedur baru yang telah digunakan secara efektif yang telah dirancang untuk kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian sebuah inovasi memerlukan kreativitas yaitu pengenalan ide baru, dalam sebuah proses, prosedur. Dan mengartikan elemen kedalam sebuah produk agar lebih bermanfaat. Zacher (2014) menyarankan bahwa organisasi terlibat dalam dua jenis kegiatan untuk memfasilitasi inovasi yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Organisasi unggul dalam memanfaatkan produk yang ada untuk memungkinkan inovasi tambahan dan untuk mengeksplorasi peluang baru untuk mendorong inovasi yang lebih terbaru (Zacher, 2014)

Implementasi penyaluran bansos yang dilakukan oleh bupati probolinggo tersebut telah dilakukan melalui kantor PT.POS yang ada disekitar Kabupaten Probolinggo. Masyarakat yang terdaftar nantinya akan di infokan oleh petugas RT/RW setempat untuk nantinya masyarakat dapat mengambil bantuan sosial tersebut di kantor pos masing-masing dengan membawa data pribadi dan surat penerima bansos yang telah di data sebelumnya oleh petugas RT/RW setempat. Lalu dalam penyerahan bansos tersebut, harus tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah di tentukan. Seperti memakai masker, menjaga jarak dan Prokes lainnya yang terdiri dari 5M.

Bantuan sosial tunai diberikan kepada warga dringu kabupaten probolinggo dengan penerima 1,234 orang yang terdampak Covid-19, bantuan tersebut disalurkan melalui kantor pos indonesia

didringu, bantuan sosial tersebut diberikan kepada warga yang tidak pernah menerima bantuan sosial lainnya, bentuk bantuan yang diterima merupakan uang tunai 600.000 perbulan diberikan selama 3 bulan. Berdasarkan penelitian penyaluran dana bansos awal mulanya masyarakat yang mengajukan hingga akhirnya bansos tersebut diterima oleh pemohon, tahapan yang dilakukan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum sesuai yang ditetapkan Permendagri No. 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian dana hibah dan bansos yang bersumber dari dana APBD, dan telah diubah oleh permendagri no 39 tahun 2012 (Gede et al., 2016).

Lalu inovasi layanan pengaduan bansos yang di buat oleh Pemkab Probolinggo tersebut, yaitu berupa website dan melalui whatsapp. Jika melalui website, yaitu <https://siagacovid19.probolinggokab.go.id/bansos/data>, dan untuk melalui whatsapp Silahkan untuk mengakses layanan informasi terkait status kepesertaan bansos serta pengaduan masyarakat dengan menghubungi nomor WhatsApp atau SMS pada 081132285555 dengan format nama lengkap (spasi) nomor KTP (spasi) nomor KK (spasi) alamat lengkap (spasi) aduan (*Sediakan Layanan Informasi Status Kepesertaan Bansos dan Pengaduan Masyarakat – Portal Kabupaten Probolinggo*, 2020).

Ucapan Terima Kasih

Pertama peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang telah secara transparan berbagi data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terimakasih pada segenap reviewer yang telah memberikan komentar pada versi pertama tulisan ini sehingga peneliti dapat melengkapi substansi yang ada dan memperdalam analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar prambadi, gilang. (2020). *16.074 Warga Probolinggo Terima Bansos | Republika Online*. <https://www.republika.co.id/berita/qabr2u456/16074-warga-probolinggo-terima-bansos>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi 2010) | Perpustakaan FIS*. <http://files/260/index.html>
- Bestari Kumala Dewi. (2021). *Setahun Pandemi Covid-19, Ini 6 Hal terkait Virus Corona yang Masih Jadi Misteri Halaman all - Kompas.com*. KOMPAS.Com. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/02/193000223/setahun-pandemi-covid-19-ini-6-hal-terkait-virus-corona-yang-masih-jadi?page=all>
- Bryson, J. M. (2004). What to do when Stakeholders matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21–53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>
- BST Disalurkan, Pemkab Probolinggo Juga Sediakan Layanan Aduan COVID-19. (2020). In *Nusa Daily*. <https://nusadaily.com/regional/bst-disalurkan-pemkab-probolinggo-juga-sediakan-layanan-aduan-covid-19.html>
- Bupati Tantri Serahkan BLT DD Bagi Masyarakat Terdampak Wabah COVID-19 – Portal Kabupaten Probolinggo*. (2020). <https://probolinggokab.go.id/bupati-tantri-serahkan-blt-dd-bagi-masyarakat-terdampak-wabah-covid-19/>
- Dadu, F. D., & Sodik, M. A. (2021). *Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19*.
- Dur, P. (2020). Pemkab Probolinggo Luncurkan Aplikasi Inovasi Layanan Pengaduan Bansos. In *Harian Bangsa*. <https://harianbangsa.net/probolinggo-luncurkan-aplikasi-inovasi-layanan-pengaduan-bansos>
- Gede, P., Sumerthayasa, A., & Sarna, K. (2016). Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Bali. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 4(6), 1–5.
- hartomo, giri. (2018). *3 Cara agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran dan Waktu : Okezone Economy*. <https://economy.okezone.com/read/2018/08/08/320/1933480/3-cara-agar>

penyaluran-bansos-tepat-sasaran-dan-waktu

- Hasibuan, A., Sulaiman, O. K., Pebriani, V., Rohman, A., Satrio, E. M., Rochani, A., Akbar, T., nurman, ahmad, Mariswara, I., Sumerthayasa, P., Sarna, kadek, Puspitarini, R. C., Mufarendra, Puspitarini, R. C., Kompasiana.com, Times, I. D. N., Malang, H. P., Puspitarini, R. C., Anggraini, I., ... Iqman, I. (2021). Puluhan Warga Probolinggo Protes Karena Tak Dapat Bansos. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 8(2), 49–54. <https://doi.org/10.36456/wahana.v70i2.1741>
- Kuhlthau, C. C. (2004). *Seeking meaning: a process approach to library and information services*. Libraries Unlimited.
- Nazir, M. (1988). *Research methods*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Radar Bromo, dringu. (2020). 3 Hari, Ada 200 Aduan Bansos di Kab Probolinggo / Radar Bromo. <https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/15/05/2020/3-hari-ada-200-aduan-bansos-di-kab-probolinggo/>
- Sediakan Layanan Informasi Status Kepesertaan Bansos dan Pengaduan Masyarakat – Portal Kabupaten Probolinggo. (2020, May 21). <https://probolinggokab.go.id/sediakan-layanan-informasi-status-kepesertaan-bansos-dan-pengaduan-masyarakat/>
- Wahyudi, S. (2019). *TEORI INOVASI: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA*. 5(2).
- Zacher. (2014). *The Journal Of Creative Behavior (JCB)*.
- Zed. (2004). *hlm. 3 1 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008*,. <https://docplayer.info/77315129-Hlm-3-1-mestika-zed-metode-penelitian-kepustakaan-yayasan-obor-indonesia-jakarta-2008.html>